



PERLAWANAN RAKYAT MAKASAR DALAM
MENGHADAPI PERDAGANGAN
VOC 1616 - 1667

SKRIPSI



Oleh :

JUNIARTI

NIM. 9202105106



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER

SEPTEMBER 1997

MOTTO :

"Hanya bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya akan menjadi bangsa yang besar.

(Soekarno)



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah berusaha dan berdo'a untukku dalam menuntut ilmu demi cita-cita.
2. Kakek, Nenek, Bulek dan Paklek semuanya yang selalu memberikan perhatian dan semangat dalam hidup ini.
3. Guru-guruku yang selalu saya hormati.
4. Celon Suamiku Soni Sapta Winarsno tercinta.
5. Rekan-rekan seperjuangan.
6. Almamater yang kubanggakan.

PERLAWANAN RAKYAT MAKASAR DALAM
MENGHADAPI PERDAGANGAN
VOC 1616 - 1667

S K R I P S I

Disajikan untuk dipertahankan di depan Tim penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh

Nama Mahasiswa	:	JUNIARTI
NIM	:	9202105106
Angkatan Tahun	:	1992
Daerah Asal	:	Sukoharjo
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Sukoharjo, 22-06-1972
Jurusan/Program	:	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/Pendidikan Sejarah

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dra. Sri Handayani

NIP. 131 472 786

Pembimbing II,

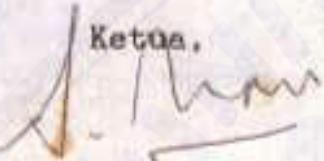
Drs. Sugiyanto

NIP. 131 472 790

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji, dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai skripsi Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 2 September 1997
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Soemarno
NIP. 131 403 352

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto
NIP. 131 472 790

Anggota :

1. Drs. H. Choesnoel Hadi
NIP. 130 445 578
2. Drs. Paulus Waluyo
NIP. 130 239 030
3. Dra. Sri Handayani
NIP. 131 472 786





Mengetahui

Dekan,

Drs. SOEKARDJO EW
NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kecuali dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Kepala Pusat Penelitian Universitas Jember;
4. Kepala Perpustakaan Pusat beserta staf Universitas Jember;
5. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember;
6. Ketua Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
7. Pembimbing I dan II;
8. Semua Dosen Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga atas segala kebaikan yang telah beliau-beliau berikan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun demi peningkatan karya tulis penulis pada masa yang akan datang.

Jember, 2 September 1997

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PRNGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
PETA PERKEMBANGAN UMUM KERAJAAN MAKASAR SAMPAI TAHUN 1657	ix
PETA BENTENG-BENTENG KERAJAAN MAKASAR	x
RINGKASAN	x1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan...	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	4
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan..	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbedaan Perdagangan Rakyat Makasar dengan VOC	10
2.2 Perlawanan Rakyat Makasar dalam menghadapi Monopoli Perdagangan VOC	14
2.3 Hipotesis	18

BAB 1.1 METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian	20
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah ...	20
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.5 Metode Analisis Data	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbedaan Percagangan Rakyat	
Makasar dengan VOC	29
4.1.1 Perdagangan Rakyat Makasar	28
4.1.2 Perdagangan VOC	33
4.2 Perlawanan Rakyat Makasar dalam	
menghadapi Monopoli Percagangan VOC,	36
4.2.1 Masa Sultan Alaudin 1593-1639	36
4.2.2 Masa Sultan Muhammad Said 1639-1653 .	44
4.2.3 Masa Sultan Hasanrudin 1653-1669	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran :

1. Matrik Penelitian
2. Iai Perjanjian Bungaya
3. Surat Keterangan Studi Literatur

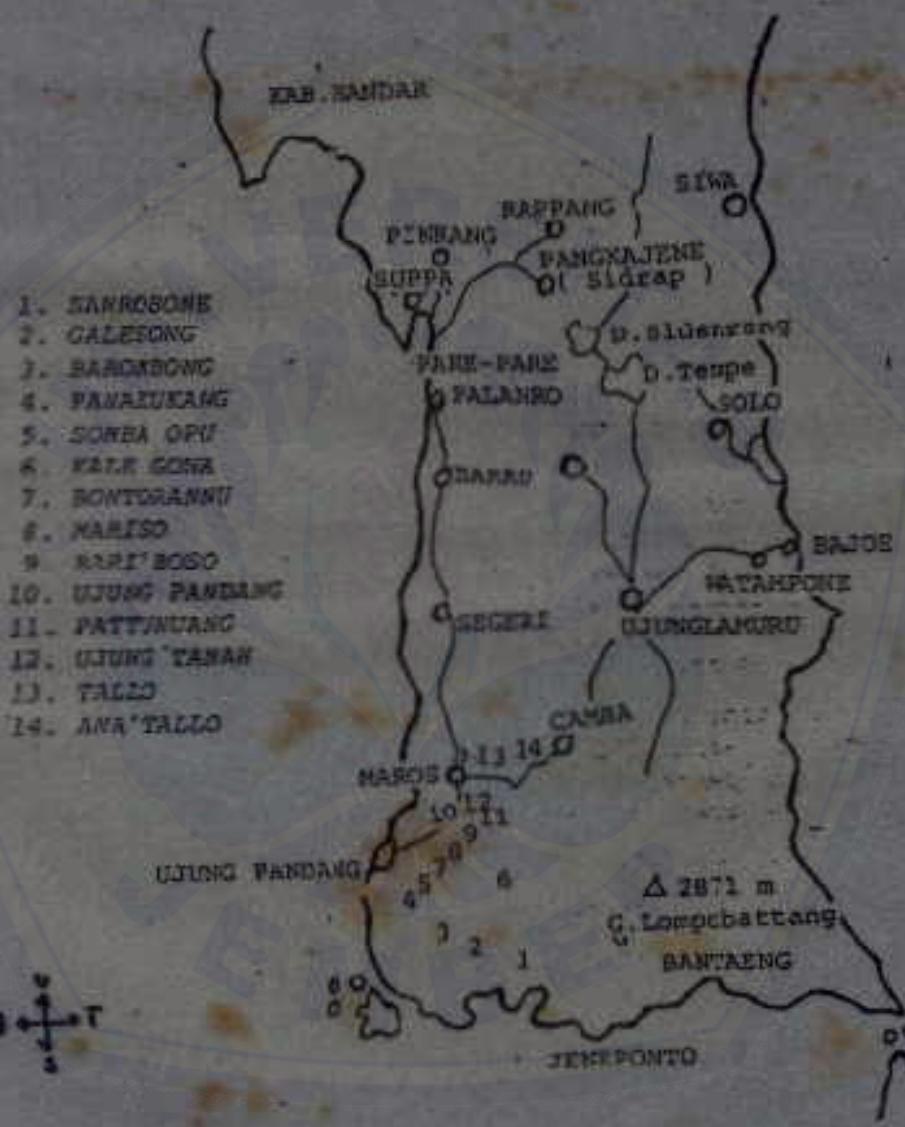
Foto 2. Peta Indonesia dan Selatan
Tahun 1667



Bumber: Poldarmad Yamini, 1975,
Alat - II Spillet, h. 35 cm

Lampiran 4. Weta Benteng-benteng Kerajaan Makassar

BENTENG - BENTENG PERTAHANAN KERAJAAN GOWI DIABAU
KE 17 NASEHI ————— (SEJAKAN MILITER KUNI)



Sumber: Sayeay Kebudayaan Sulawesi Selatan dan
Tenggara, Sekitor Benteng Ujung Pandang,
Ujung Pandang

RINGKASAN

Juniarti, S202105106. Perlawanan Rakyat Makasar Dalam Menghadapi Perdagangan VOC 1616-1667 Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Jember.

Dosen Pembimbing : (I) Dra. Sri Handayani.
(II) Drs. Sugiyanto.

Kata Kunci : Perlawanan Rakyat Makasar, Perdagangan VOC.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis letaknya sangat strategis hal ini menyebabkan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia yang bermaknaud ingin mencari deerah penghasil rempah-rempah yang merupakan barang dagangan yang harganya sangat mahal. Makasar yang memiliki pelabuhan transito dalam perdagangan rempah-rempah, bahan makanan, kayu cendana dan merupakan tempat persinggahan perahu-perahu dagang dari wilayah Indonesia timur sehingga Belanda ingin menguasai dengan menanamkan hak monopoli perdagangan. Berkaitan dengan hal tersebut maka masalah yang menarik yaitu (1) bagaimana perbedaan perdagangan antara VOC dengan Rakyat Makasar, (2) bagaimana perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC.

Menilik permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan ; (1) ingin mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang perbedaan perdagangan rakyat Makasar dengan VOC, (2) ingin mergetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang perlawanan Rakyat Makasar dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para sejarawan dalam rangka mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah, khususnya sejarah perekonomian Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan selama 15 bulan terhitung sejak bulan Maret 1996 sampai bulan Mei 1997. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang dilakukan dengan studi literatur, sehingga tempat penelitiannya adalah perpustakaan-perpustakaan. Dengan cara purposive sampling maka perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Laboratorium Sejarah FKIP UNEJ. Usaha untuk menemukan jawaban permasalahan diawali dengan mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumenter, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode filosofik dengan teknik logika induktif dan komparatif.

Berdasarkan metode sejarah/historik, maka hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan perdagangan antara rakyat Makassar dengan VOC yaitu perdagangan rakyat Makassar bersifat terbuka yang memberi kesempatan kepada pedagang-pedagang dari negara-negara lain untuk berdagang di Makassar dan menjual barang dagangannya kepada siapa saja yang mengajukan penawaran tertinggi. Sedangkan perdagangan yang dilakukan VOC bersifat monopoli, yaitu perdagangan dalam hasil bumi yang hanya dihasilkan untuk VOC dan tidak boleh dijual kepada orang lain, meskipun yang menanam sendiri. Perlawanan rakyat Makassar dalam menghadapi perdagangan VOC, yaitu menentang dan mengadakan perlawanan baik secara diplomatik atau fisik. Hal ini dilakukan baik pada masa Sultan Alauddin yang dengan gigih melawan VOC, dilanjutkan pada masa Malikussaaid. Namun pertempuran atau perlawanan yang dilakukan rakyat Makassar dalam menghadapi perdagangan VOC itu mencapai puncaknya pada masa Sultan Hasanuddin.

Sedangkan saran-saran yang penulis ajukan adalah untuk mahasiswa Program Pendidikan Sejarah, sebagai calon guru sejarah, sebaiknya lebih mencalami materi sejarah sebagai persiapan terjun ke masyarakat, untuk para peneliti sebaiknya lebih banyak membaca hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian yang lebih baik, bagi almamater hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih banyak menyediakan literatur sehingga penelitian di Universitas Jember terus berkembang dan bermutu sebagai wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

SAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan.

Sekitar tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia yang pada waktu itu armada atau kapal-kapal Belanda dibawah pimpinan Cornelis De Houtman pertama kali berlabuh dipe-labuhan Banten. Dengan demikian Belanda telah berhasil menemukan jalur perjalanan ke Asia pada umumnya dan ke Indonesia pada khususnya yang mempunyai kekayaan yang berlimpah. Sejak saat itu banyak kapal-kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia untuk berdagang (Sagimun M.D., 1985 : 89). Namun demikian kedatangan ini mula-mula diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia, akan tetapi karena sengsara, kasar serta tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia, maka dimana-mana mereka tidak mendapat sambutan yang baik dan akhirnya diusir dari Indonesia kembali ke negaranya.

Tahun 1597 Belanda mengadakan perjalanan ke Indonesia yang kedua, daerah yang dieinggahi adalah daerah Indonesia bagian barat yaitu khususnya dipulau Jawa. Pulau Sulawesi khususnya Kerajaan Makasar di Sulawesi Selatan belum di singgahi dan sekitar tahun 1600 Belanda mengadakan perjalanan ke Maluku, kemudian barulah mereka menyadari pentingnya Makasar yang sebagai peleburhan transito, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, bahan makanan dan kayu cendana. Selain itu juga Makasar dengan ibukotanya Sanbeupou menjadi tempat persinggahan perahu-perahu dagang dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur (Sagimun, 1983 : 16-17).

Letak geografis Makassar yang strategis dengan memiliki pelabuhan yang sangat menarik sebagai pelabuhan dalam pelayaran antara Makassar dan Maluku mengalami perkembangan yang pesat pada sekitar abad XVII, ini sebagai akibat adanya kemunduran-kemunduran pelabuhan Jawa. Pendudukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 mengakibatkan pulau suatu perpindahan pedagang Melayu ke pulau lain seperti Makassar. Makassar pada waktu itu menjadi pusat penasaran hasil dari wilayah Indonesia Timur serta tempat pengambilan bahan makanan.

VOC yang didirikan oleh bangsa Belanda tahun 1602 mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. VOC bersegera mengakui kekuasaan raja-raja di Indonesia dengan tidak memandang kulit, asal mungkin tidak memaksakan perjanjian dengan VOC (H.J. Van Den Berg, 1955:165). Pada waktu itu kekuasaan VOC di Indonesia bertambah luas, hampir seluruh Indonesia sudah dapat dikuasai termasuk Indonesia bagian timur sehingga hal ini merupakan akibat bagi Makassar yang menjadi pusat perdagangan dengan Maluku, karena VOC sudah menanamkan monopolinya di Maluku. Tentu saja Rakyat Makassar menentang monopoli itu dengan sekutu tenaga, antara lain membantu Amboin melawan VOC dan mengajurkan orang-orang Portugis, Inggris, Prancis yang datang kesitu yang membeli rempah-rempah dan sepeye mendirikan benteng-benteng untuk memblokade perdagangan Belanda di Makassar. Orang-orang VOC hendak menaikkan hak monopoli perdagangan di kepulauan Maluku dan Indonesia timur pada umumnya dan siapa yang melanggar akan dihukum karena dianggap penyelundup. Raja makassar saat itu yang berkuasa yaitu Sultan Alaudin, berpendirian bahwa Tuhan menciptakan bumi dan laut agar semua orang dapat hidup menikmati pemanfaatannya berdasarkan atas pendirian tersebut, jadi laut bukanlah

monopoli Belanda saja. Dengan adanya pertentangan perbedaan kepentingan antara VOC dan rakyat Makassar sehingga perselisihan diantara dua bangsa itu tidak dapat dielekkan (Sartono Kartodirjo, 1987 : 91).

Bertolak dari uraian diatas maka yang menjadi alasan utama pemilihan permasalahan dalam penelitian ini adalah karena penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perlawanan rakyat Makassar dalam menghadapi perdagangan VOC. dimana dalam pertentangan dan perlawanan itu akhirnya VOC nantinya dapat menguasai Makassar dengan ditandainya adanya perjanjian Bongaya.

Selain alasan diatas, dasar pertimbangan lain yang penulis gunakan untuk mengkaji penelitian ini antara lain permasalahan tersebut sangat menarik dan penting untuk dibahas lebih lanjut, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan ini belum banyak diteliti oleh mahasiswa Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember, tersedianya sumber atau literatur sebagai bahan penelitian dan penulis merasa mampu untuk mengkaji dan membahasnya.

Penulis sengaja memilih penelitian Sejarah murni, oleh karena dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penggunaan materi dimana penggunaan materi (bahan) pengajaran merupakan salah satu dari sepuluh kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang profesional.

Dengan demikian historik ini mempunyai manfaat yang besar, sebagaimana Sartono Kartodirdjo mengatakan dalam bukunya pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam Metodologi Sejarah, bahwa barang siap lupa sama sekali akan menelemparunya dapat dicegah seperti mereka yang sakit jiwa. Mereka kehilangan identitasnya dan karena itu merupakan bahaya bagi masyarakat sekitarnya, antara lain karena

kelakuan nya sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai yang berlaku di lingkungan itu (1992 : 23). Selanjutnya dapat diperjelas lagi dengan pendarat Hugroho Notomusanto tentang guna sejarah yaitu, diantara nya menjadi empat guna sejarah yaitu : 1). guna edukatif (memberi pendidikan); 2). guna instruktif (memberi pengajaran); 3). guna inspiratif (memberi ilham); 4). guna rekreatif (memberi kesenangan) (1976 : 11-12). Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pelajaran-pelajaran yang bersifat mendidik yang nantinya dapat dijadikan pegangan untuk melangkah ke masa depan. disamping itu peristiwa-peristiwa gemilang pada masa lampau juga memberi inspirasi kepada kita pada taraf perjuangan sekarang dan masa yang akan datang.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis memberikan diri dalam menyusun skripsi ini dengan judul : "Perlwanan Rakyat Makassar Dalam Menghadapi Perdagangan VOC 1616-1667".

1.2 Penegasan Pengertian Judul.

Guna menghadapi kemungkinan terjadinya salah paham dan salah pengertian antara penulis dan pembaca dan juga agar pembaca penelitian ini dapat mengikuti alur pemikiran yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dari beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian seperti dibawah ini :

a. Perlawan

Perlawan berasal dari kata "lawan" yang artinya tidak sesuai atau bertentangan. Dari kata tersebut kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an", sehingga

Digital Repository Universitas Jember

menjadi "perlawanan" yang berarti suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan melenyapkan adanya ketidak sesuaian (Hassan Sadily dkk, 1984 : 147). Sedangkan menurut Badudu - Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perlawanan adalah usaha melewati, menentang adanya ketidaksesuaian (1996 : 781).

Jadi yang dimaksud dengan perlawanan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melenyapkan atau menentang adanya ketidaksesuaian dari perdagangan VOC yang diterapkan di Makassar.

b. Rakyat Makassar

Rakyat adalah sekelompok orang yang mendiami daerah dan berada pada suatu kekuasaan (Ibnu Hajar, 1986 : 24). Menurut Badudu - Zain dalam kamus Umum bahasa Indonesia, rakyat adalah penduduk suatu negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan berada pada suatu kekuasaan (1996 : 1065). Sedangkan yang dimaksud dengan Makassar adalah nama suatu wilayah atau pulau yang terletak di Jazirah Semenanjung Mandar pulau Sulawesi (Van Den Berg, H.J. Kroeskamp, 1951 : 160).

Jadi Rakyat Makassar adalah Sekelompok orang yang bertempat tinggal di Jazirah Semenanjung Mandar pulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Selatan yang terkenal sekarang dengan sebutan Ujungpandang.

c. Menghadapi Perdagangan

Menghadapi berasal dari kata "hadap" yang artinya menentang. Dari kata tersebut kemudian mendapat awalan "meng" dan akhiran "i" sehingga menjadi "menghadapi" yang berarti suatu tindakan menentang (WJS. Poerwodarminto, 1991 : 290). Sedangkan menurut Badudu - Zain dalam dalam

kamus Umum bahasa Indonesia, menghadapi suatu tindakan untuk menentang atau berhadapan dengan atau dihadapai sesuatu (1996 : 485). Sedangkan perdagangan adalah cara atau usaha yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan (WJS. Poerwodarminto, 1991 : 180).

Jadi yang dimaksud menghadapi perdagangan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menentang atau berhadapan dengan suatu dagang atau jual beli barang untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan rakyat Makassar terhadap VOC.

d. VOC

VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost Indische Compagnie yang biasa disebut dengan nama kompeni. VOC adalah organisasi perdagangan Belanda yang disyahkan Steten General pada bulan maret 1602. VOC oleh pemerintah Belanda diberi hak untuk berdagang dikawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Solomon (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 71). Sedangkan menurut Sagimun, VOC adalah Perserikatan dagang Belanda di Hindia Belanda bertujuan untuk mencegah persaingan dan permusuhan diantara pedagang-pedagang Belanda yang diprakarsai oleh tokoh dan pimpinan Belanda yang bernama John Van Oldenberdevelt (1985 : 100).

Jadi yang dimaksud dengan VOC adalah Verenigde Oost Indische Compagnie atau perserikatan Dagang Belanda di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencegah persaingan dan permusuhan diantara pedagang-pedagang Belanda oleh pemerintah Belanda diberi hak untuk berdagang dikawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Solomon

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang berjudul Perlawan Rakyat Makassar dalam menghadapi perda-



gangan VOC 1616 - 1667 dapat tegaskan maksudnya adalah suatu upaya yang dilakukan Rakyat Makasar dalam menentang atau berhadapan dengan suatu dagang atau cara perdagangan VOC yang diterapkan di Makasar.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan.

1.3.1 Ruang Lingkup Permasalahan.

Mengingat sangat kompleksnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan ruang lingkup penelitian sangatlah penting dengan tujuan menghindari penyimpangan-penyimpangan diluar permasalahan.

Pembahasan permasalahan ini ruang lingkupnya adalah antara tahun 1616-1667. Tahun 1616 penulis ambil sebagai awal scope temporal penelitian ini, karena pada tahun 1616 tersebut merupakan tahun kapal Belanda De Eenderacht tersesat di perairan Makasar. Semua awak kapal tersebut dibunuh oleh orang Makasar karena dendam atas kecurangan orang-orang Belanda yang membunuh orang-orang Makasar di atas kapal Belanda. Sedangkan tahun 1667 merupakan tahun diadakan perjanjian Bongaya yaitu antara Belanda dan Makasar yang telah menandai bahwa Makasar telah dapat dikuasai oleh Belanda.

Namun sebelumnya perlu penulis tegaskan bahwa pembahasan temporal awal tersebut tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu penulis masih mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelum tahun 1616 yang melatar belakangi perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi perdagangan VOC 1616-1667.

Sedangkan scope spasialnya, penulis batasi hanya di Sulawesi Selatan dan Maluku. Inipun tidak bersifat kaku, karena perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi perdagangan VOC 1616-1667.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Setiap pelaksanaan penelitian selalu bertitik tolak dari adanya permasalahan, karena permasalahan merupakan sesuatu hal yang selalu dihadapi oleh manusia, sebab dalam hidupnya manusia selalu menghadapi permasalahan, jarang sekali manusia melewatkannya tanpa menghadapi sesuatu masalah, besar atau kecil (Sutrisno Hadi, 1991:1).

Menurut Winarno Surakhmad "masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya" (1982:33), sedangkan pengertian masalah menurut Mohamad Ali "Masalah pada hakikatnya adalah segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk hambatan, rintangan atau kesulitan yang muncul pada sesuatu bidang yang perlu dihindari dan disingkirkan (1986 : 31).

Bertolak dari latar belakang pemilihan permasalahan pada butir 1.1 dan ruang lingkup penelitian pada butir 1.3.1. maka permasalahan penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. bagaimanakah perbedaan perdagangan rakyat Makasar dengan VOC.
2. bagaimanakah perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC.

1.4 Tujuan Penelitian.

Suatu kegiatan penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi peneliti dalam mendekan penelitian dan pemecahan masalah. Berpijak dari rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. ingin mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang perbedaan perdagangan rakyat Makasar dengan VOC.
2. ingin mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC.

1.5 Manfaat Penelitian.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan berupa hasil penelitian sejarah Sulawesi Selatan guna menambah khasanah kepustakaan tentang perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi perdagangan VOC.
2. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, untuk menambah pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan materi sejarah terutama tentang perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi perdagangan VOC 1616-1667.
3. Bagi almamater, merupakan perwujudan dari salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. khususnya dharma penelitian yang hasilnya dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Universitas Jember.
4. Bagi penulis, merupakan media latihan untuk berfikir kritis dan logis dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme sebagai calon guru sejarah.

BAB II
TINJAJAN PUSTAKA

2.1 Perbedaan Perdagangan Rakyat Makassar dengan VOC

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, tiap pulau dipisahkan oleh suatu selat-selat. Dari segi geografis letak Indonesia yang strategis sejak zaman dahulu sudah banyak dilalui pedagang-pedagang dari negara-negara lain hal ini disebabkan letak Indonesia berada di jalur lalulintas perdagangan internasional. Pada awal abad XV bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia yaitu ke daerah-daerah pantai yang merupakan pusat perdagangan di Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia bermaksud mencari rempah-rempah yang merupakan barang dagangan di Eropa yang harganya sangat mahal, maka bangsa Eropa ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah. Perdagangan Indonesia mengutamakan pada ekspor cengkeh dari Ternate, Ambon dan Seram, Pala dari Kepulauan Banda dan lada dari Sumatra, Banten dan Malaka (Sartono Kartodirdjo, 1992:62).

Di Indonesia terdapat dua golongan pedagang, yaitu (1) golongan saudagar keliling yang menjajakan barang dagangannya berkeliling dari kota yang satu dengan yang lain, (2) golongan pemberi kredit (uang) yang biasanya tinggal dirumah saja, yang menjadi pemberi modal ini para raja atau bangsawan (D.H. Burger, 1962 : 58). Pusat-pusat perdagangan di Indonesia pada umumnya terletak di daerah pantai, misalnya Banten, Cirebon, Gresik, dan Tuban. Banten merupakan tempat perdagangan lada oleh karena lada dari Banten mutunya kurang baik, maka para pedagang Banten mengambil lada dari Lampung, Indrapura dan Pelembang yang mutunya lebih baik. (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 68).

Pada sisi lain Malaka yang dikenal sebagai pusat transisi perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat baik bagi pedagang-pedagang asing maupun pedagang Indonesia sendiri. Dengan letak geografi yang sangat menguntungkan itu, maka Malaka menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Malaka yang merupakan tempat bertemuanya pedagang-pedagang dari Asia maupun dari Indonesia sendiri dalam melakukan perdagangan bersifat terbuka dan menyerahkan barang dagangannya kepada siapa saja yang mengajukan penawaran tertinggi (Nugroho Notosusanto, 1990 : 29-30). Permulaan abad XVI bangsa Portugis mulai datang ke Malaka, sekitar tahun 1511 Malaka jatuh ketangan Portugis sehingga mengakibatkan perpindahan pedagang-pedagang dari Persia, India, Cina dan daerah-daerah lain kepuleuan lain seperti Makassar (Nugroho Notosusanto, 1990 : 37).

Letak geografis Makassar yang strategis dengan memiliki pelabuhan yang sangat menarik sebagai pelabuhan dalam pelayaran antara Makassar dan Maluku mengalami perkembangan yang pesat pada sekitar abad XVII, ini sebagai akibat adanya kemunduran dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa. Makassar pada waktu itu menjadi pusat pemasaran hasil dari wilayah Indonesia Timur serta tempat pengambilan bahan makanan (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 91). Letak Makassar yang lebih baik dari Malaka, semakin bertambah besar dan dikenal oleh pedagang dari timur seperti Borneo, Jawa, Bali, Solor, Timor, Ambon, Maluku dan tempat-tempat lain. Jalan perdagangan di laut yang terpenting di Indonesia menjadi berubah. Sebelumnya kapal-kapal berlayar dari pulau Maluku melalui Jawa Timur kearah Selat Malaka dan sebaliknya. Setelah abad XVI pelayaran dari Maluku ke Selat Malaka melalui Makassar. Pada permulaan abad XVII

Makassar menjadi tempat penimbunan yang terbesar untuk perdagangan rempah-rempah di Maluku (Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1978 : 8).

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang, tidak seperti bangsa Portugis selain berdagang juga mempunyai tujuan untuk memperjuangkan agama (berjuang untuk perang salib). Bangsa Belanda pada awalnya melakukan kongsi dagang yang menyediakan kapal-kapal dagang, akan tetapi dalam tahun 1602 telah didirikan suatu organisasi yang bernama Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yaitu suatu gabungan kongsi-kongsi dagang yang berlayar ke Indonesia (D.H.Burger, 1962 : 50). VOC yang ada di Indonesia mempunyai hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk mengurus sesua kepentingan yang ada di Indonesia. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, hal ini yang dimaksud bahwa perjanjian yang dilakukan oleh VOC dengan raja-raja setempat yang sejinya dari perjanjian itu. VOC ingin memaksakan hak monopoli perdagangan di daerah mana VOC itu mengadakan perjanjian yang juga termasuk di Makassar (Sagimun, 1985 : 100).

Belanda mulai mengetahui bahwa Samboupu (ibukota kerajaan Goa) adalah sebuah tempat yang sangat strategis letak untuk berlayar kepulauan Maluku dan demikian pula kembalinya. Di Somboupu banyak beras yang sangat baik mutunya, demikian pula ternak harganya murah. Di Samboupu Belanda juga bebas dari gangguan orang-orang Portugis yang menjadi musuh besar Belanda (Sagimun, 1985 : 103).

Perkembangan perdagangan dan pelabuhan di Makassar itu mengalirlah barang-barang ke Makassar seperti sutera dan pesoh behah dari Cina dengan kapal Siam dan bahan pakaian dengan kapal Portugis (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 88).

Dalam melakukan perdagangan, Makassar menggunakan sistem perdagangan terbuka yang memberi kesempatan kepada pedagang-pedagang dari negara-negara lain. Misalnya Portugis, Perancis, Inggris, Denmark, dan Spanyol.

Prinsip sistem terbuka yang digunakan oleh pedagang Makassar berdasarkan pada teori "Laut Bebas". Teori yang dianut oleh rakyat Makassar dan sesuai benar dengan status politik Makassar serta pelabuhan Makassar pada masa itu. Kekuasaan politik yang ada pada Makassar, kebebasan berdagang di wilayahnya lebih menguntungkan dari pada merugikan. Lagi pula pedagang-pedagang asing mendapatkan jaminan bagi usaha mereka sehingga hasil yang diperoleh dari sektor perdagangan internasional dapat menghidupi rakyat Makassar. Prinsip sistem terbuka yang dianut Makassar dalam menjalankan Politik perdagangan, menurut Sultan Alaudin raJa yang berkuasa pada waktu itu menyatakan "Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan lautan. Bumi telah dibagi-bagikan diantara manusia, begitu pula lautan telah diberikan untuk umum. Tidak pernah terdengar bahwa pelayaran dilautan dilarang bagi seseorang" (Sagimun M.D., 1985 : 71).

Dipihak VOC dalam perjalanan berdagang berpegang pada sistem monopoli yaitu perdagangan dalam hasil bumi yang hanya dihasilkan untuk VOC dan tidak boleh dijual atau diambil oleh orang lain, meskipun yang menanam sendiri, dengan kata lain : (1) paksaan menanam hasil bumi. (2) menanam dengan jumlah hasil yang ditetapkan oleh VOC (3) paksaan menjual hasil itu kepada VOC (4) milarang menjualnya kepada orang lain (5) menjual hasil tanamannya itu dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC yaitu harga yang terendah-rendahnya (Mohamad Ali, 1963 : 123).



VOC menjaga jangan sampai pasar dimana saja (di Eropa dan di Indonesia) dapat menjual rempah-rempah lebih dari pada yang diperlukan. Makin banyak barang makin kurang harganya. Karena itulah maka VOC membatasi jumlah, memberantas siapa saja yang berani melebihi jumlah agar dengar jalan itu dapat menguasai harga dipasar dunia. Begi tiap-tiap daerah yang melanggar monopoli akan dihukum seberat-beratnya oleh VOC yaitu dengan : (1) kapal-kapal selain kapal-kapal VOC yang menyerobot monopoli dikejer, dirampas dan orangnya dijual sebagai budak belian. Bila pedagang itu berasal dari satu negara yang masih merdeka kerajaan itu dibinasakan atau dijadikan kerajaan bawahan dibawah pengawasan VOC. (2) penduduk yang berani menjual hasil bumi (rempah-rempah) kepada pedagang colain VOC dihukum berat. Tanah dan tanaman-tanamannya dirampas, orang-orangnya ditawan dan dijual sebagai budak atau dibinasakan sama sekali. (3) bila ternyata bahwa jumlah tanaman melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh VOC tanaman dibinasakan. (Mohamad Ali. 1983 : 123-125). Dengan adanya perbedaan sistem perdagangan diantara VOC dan rakyat Makassar yang makin lama makin meruncing sehingga menimbulkan perlawanan dari rakyat Makassar.

2.2 Perlawanan Rakyat Makassar dalam menghadapi Monopoli Perdagangan VOC

VOC hendak memaksakan hak monopolinya dalam perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku, mereka melarang dengan keras bangsa-bangsa lain termasuk Makassar. Dimana rakyat Makassar dalam perdagangannya mengambil rempah-rempah di Maluku. Sultan Alaudin menghendaki adanya

perdagangan yang bebas. Rakyat Makassar tidak membedakan antara bangsa Belanda dan bangsa-bangsa yang lainnya seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, Bangsa Prancis, bangsa Denmark yang datang untuk berdagang di wilayah kekuasaannya. Rakyat Makassar menyerahkan barang dagangannya kepada siapa saja yang mengajukan penawaran tertinggi (Sagimun, 1985 : 107).

Usaha VOC untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan rakyat Makassar yang pada waktu itu itu Makassar di perintah oleh Sultan Alaudin (tahun 1593-1639) tidak berhasil. Karena VOC selalu memuntut dan mengemukakan hak monopoli perdagangannya, sedang rakyat Makassar selalu menjalankan kebijaksanaan perdagangannya yang bersifat terbuka. Untuk mengurangi ketegangan maka dikirimlah Anthoenie Coen ke makasar. Tanggal 2 Mei 1632 utusan VOC itu sampai di Sembalpu namun utusan VOC ini gagal mencapai pesetujuan dengan rakyat Makassar (Sagimun, 1983 : 21). Tahun 1621 J.P. Coen mengirimkan Jan Jossten ke Sambalpu dengan sepucuk surat untuk menjelaskan apakah dapat diedakkan perjanjian yang menguntungkan pihak VOC. Rakyat Makassar menerima utusan VOC itu dengan baik dan ramah tamah, Sultan Alaudin menjelaskan bahwa rakyat Makassar bersedia bersahabat dengan bangsa manapun termasuk dengan VOC. Atas undangan Sultan Alaudin, orang Belanda mulai mengirimkan beberapa utusan ke Gowa dengan pesan-pesan khusus. Pesan ini adalah mengajak Gowa menyerang Banda yang merupakan gudang rempah-rempah tetapi ajakan ini tidak mendapat jawaban dari Gowa (Sagimun, 1985 : 104).

Kunjungan-kunjungan oleh Belanda, mulai sering dilakukan di wilayah Makassar. Belanda selalu berusaha untuk membujuk raja Gowa agar tidak lagi menjual teras kepada orang-orang Portugis. Akan tetapi raja Gowa ini tidak

perdagangan yang bebas. Rakyat Makassar tidak membedakan antara bangsa Belanda dan bangsa-bangsa yang lainnya seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, bangsa Prancis, bangsa Denmark yang datang untuk berdagang di wilayah kekuasaannya. Rakyat Makassar menyerahkan barang dagangannya kepada siapa saja yang mengajukan penawaran tertinggi (Sagimin, 1985 : 107).

Usaha VOC untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan rakyat Makassar, yang pada waktu itu Ibu Makassar di perintah oleh Sultan Alaudin (tahun 1593-1639) tidak berhasil. Karena VOC selalu menuntut dan mengemukakan hak monopoli perdagangannya, sedang rakyat Makassar selalu menjalankan ketidaksesuaian perdagangannya yang bersifat terbuka. Untuk mengurangi ketegangan maka dikirimlah Anthoenie Coen ke makassar. Tanggal 2 Mei 1632 utusan VOC itu sampai di Sembalupo namun utusan VOC ini gagal mencapai kesepakuan dengan rakyat Makassar (Sagimin, 1983 : 21). Tahun 1621 J.P. Coen mengirimkan Jan Jossten ke Sembalupo dengan sepuasnya surat untuk menjajaki apakah dapat diadakan persetujuan yang menguntungkan pihak VOC. Rakyat Makassar menerima utusan VOC itu dengan baik dan ramah tamah. Sultan Alaudin menjelaskan bahwa rakyat Makassar bersedia bersahabat dengan bangsa manapun termasuk dengan VOC. Atas undangan Sultan Alaudin, orang Belanda mulai mensirimkan beberapa utusan ke Gowa dengan pesan-pesan khueuo. Pesan ini adalah mengajak Gowa menyerang Banda yang merupakan gudang rempah-rempah tetapi ajakan ini tidak mendapat jawaban dari Gowa (Sagimin, 1985 : 104).

Kunjungan-kunjungan oleh Belanda, mulai sering dilakukan di wilayah Makassar. Belanda selalu berusaha untuk membujuk raja Gowa agar tidak lagi menjual beras kepada orang-orang Portugis. Akan tetapi raja Gowa ini tidak

Masa pemerintahan Sultan Hasanuddin hubungan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC makin hari makin tegang dan meruncing (Sagimun, 1985 : 122). Usaha dari Sultan Hasanuddin ada dua langkah yaitu (1) memperketat pengawasan terhadap Bone; (2) menggerakkan tenaga kerja untuk memperkuat pertahanan Makassar (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 94).

Perang terbuka pecah pada awal tahun 1654 tak dapat dielakkan lagi. Ketika De Vlaminck kembali ke Maluku dan mengepung orang-orang yang tidak senang kepada Belanda dan ikut bergabung dengan rakyat Makassar. Antara tahun 1654, 1660, 1666, 1667 merupakan tahun-tahun pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC dimana dalam pertempuran itu merupakan pertempuran yang besar dan berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik kedua belah pihak. Kejadian tetap meruncing karena pihak Belanda memberi bantuan kepada Aru Pallaka yang dianggap telah menentang kepada rakyat Makassar. Adapun kenyataan bahwa Aru Pallaka justru menambah runcingnya permasalahan ini (Nugroho Notosusanto, 1990 : 82).

Perang melawan Sultan Hasanudin ini merupakan pertempuran yang sangat baik di darat maupun dilaut yang memakan waktu cukup lama. VOC berhasil menghancurkan armada Makassar, sementara itu Aru Pallaka ikut memimpin serangan lewat darat (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 94). Pertempuran yang seru terjadi di Buton, Maluku terutama disekitar pulau Ambon, pulau Buru dan Saram. Pertempuran rakyat Makassar yang berpusat di Assahudi selalu mendapat bantuan dari Makassar maupun dari pasukan-pasukan yang menentang VOC (Sagimun, 1985 : 123). siasat VOC dalam berperang ternyata juga mempergunakan suu domba dengan tujuan untuk mempersulit posisi rakyat Makassar.

Dengan kegigihan dari Sultan Hasanuddin yang bersama rakyatnya membela kedaulatan wilayahnya, maka untuk mencegah datuhnya korban yang lebih banyak lagi dari kedua belah pihak, akhirnya diadakan suatu usaha kearah perdamaian antara rakyat Makassar yang diwakili Sultan Hasanuddin dengan VOC (Abd. Muttalib, 1980 : 10). Akhirnya VOC dan sekutu-sekutunya terutama suku Bugis keluar sebagai pemenang. rakyat Makassar harus mengakui keunggulan VOC.

2.3 Hipotesis

Setiap penelitian ilmiah haruslah mempunyai dasar pegangan tertentu. Bila mana suatu penelitian tidak menggunakan dasar berpijak, maka tidak akan menuju kearah yang tepat. Untuk memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, maka diperlukan hipotesis sebagai pengaruh dalam penelitian. Hipotesis merupakan tesis (kesimpulan) yang "hipo" (tarafnya rendah) karena belum diuji oleh kenyataan empirik sehingga disebut pula "kesimpulan teoritik", dan kesimpulannya akan berbunyi hipotesis itu benar atau salah (Tateng M.Amirin, 1990:10).

Sutrieno Hadi dalam hal ini mengesukakan pendapatnya bahwa, "hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah satu paleu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan" (1991 : 63). Kemudian Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa hipotesis adalah suatu teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji (dibawah kebenaran) (1989 : 63). Dengan kata lain hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan ini belum final.

masih harus dibutuhkan kebenaran. Jadi hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya melalui kegiatan penelitian atau research (Kartini Kartono, 1990 : 78).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah teori, kesimpulan atau dugaan dan jawaban yang bersifat sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui penelitian.

Adapun yang menjadi fungsi dari hipotesis ini menurut Marzuki adalah sebagai berikut :

1. memperoleh suatu kesimpulan tentang suatu masalah;
2. memperjelas keadaan yang membingungkan atau masih menjadi tanda-tanda (puzzling situation);
3. mendapat azas bagi suatu tindakan;
4. membuat suatu prediksi yang mungkin" (1987 : 36).

Berdasarkan uraian diatas, serta fungsi hipotesis penelitian ini perlu dirumuskan agar memberikan arah yang jelas bagi penelitian selanjutnya. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

1. perbedaan perdagangan rakyat Makassar bersifat terbuka sedangkan perdagangan VOC bersifat monopoli.
2. perlawanan rakyat Makassar dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC yaitu menentang dan mengadakan perlawanan secara diplomasi dan fisik.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Fengertian metode dalam arti kata sesungguhnya adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990 : 7). Selanjutnya pengertian penelitian atau research, Sutrisno Hadi mendefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (1993 : 4). Pengertian metode penelitian menurut Mohamad Ali ialah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, yang pada dasarnya merupakan metode ilmiah atau scientific Method (1985 : 21). Sedangkan Kartini Kartono mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan peneliti (1990 : 20). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan atau untuk memecahkan permasalahan guna mencapai tujuan penelitian.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode sejarah. Pengertian metode penelitian sejarah adalah usaha untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara ilmiah. Adapun pengertian metode penelitian sejarah

menurut Gilbert J. Garraghan, seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tertulis) (1978 : 10). Sedangkan Nugroho Notosusanto sendiri mendefinisikan metode sejarah sebagai prosedur dari sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau itu (1971 : 17). Kemudian Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul Metodologi Sejarah mengatakan bahwa metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah (1993 : 12).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode sejarah ialah alat bantu bagi sejarawan yang berbentuk prinsip dan aturan mengenai prosedur kerja untuk melakukan rekonstruksi terhadap kejadian-kejadian masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan masa lampau tersebut.

Langkah-langkah yang diambil didalam keseluruhan prosedur metode penelitian sejarah dibagi atas 4 tahap :

a. Heuristik

Heuristik yaitu usaha atau kegiatan menghimpun jejak-jejak sejarah, maka jejak-jejak sejarah yang dihimpun adalah berupa bahan-bahan tertulis, seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan sifat penelitian dan juga tempat penelitiannya, maka kegiatan mengumpulkan buku-buku sumber yang dikenal dengan metode dokumenter sama artinya dengan metode pengumpulan data.

b. Kritik

Kritik ini dilakukan untuk menilai, menguji, atau menyelidiki sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh sebagai usaha untuk mendapat sumber yang benar, serta mengandung informasi yang sesuai dengan cerita sejarah yang ingin disusun. Dari setiap sumber yang diperoleh mempunyai aspek ekstern dan aspek intern, sehingga penilaian sumber sejarah dilakukan melalui dua segi pula, yaitu melalui kritik ekstern dan intern. Menurut Nugroho Notosusanto, kritik ekstern bertujuan untuk menilai kesaksian suatu sumber (1971 : 20). Adapun kritik intern sebagai kelanjutan dari kritik ekstern, artinya kritik intern ini dapat dilakukan setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa sumber-sumber atau dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya. Untuk cara internnya dapat diperoleh dengan cara : (1) menilai secara instrinsik dari sumber-sumber melihat sifat-sifat sumber dan pengaruh dari sumber itu, (2) membanding-bandangkan dari berbagai sumber (Nugroho Notosusanto, 1971 : 21). Nugroho Notosusanto juga menyatakan bahwa tujuan kritik secara keseluruhan adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta (1978 : 11).

c. Interpretasi

Interpretasi atau tahap penafsiran menurut Mohamad Ali meliputi (1) Seleksi fakta yakni menulis fakta yang relevan dengan kepentingan (2) periodisasi yakni penyusunan fakta sesuai dengan aturan periodik (urutan waktu terjadinya) (1985 : 116). Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto bahwa "berbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus kita rangkaikan dan kita hubung-hubungkan hingga terjadi satuan

yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa-peristiwa yang satu harus kita masukkan didalam konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya (1978 : 41). Jadi interpretasi yaitu usaha merangkaikan fakta-fakta yang sudah terkoreksi agar menjadi keseluruhan yang masuk akal, sehingga dapat membentuk fakta yang kronologis, rasional dan faktual.

d. Historiografi

Historiografi yaitu berupa penulisan sejarah. Historiografi ini dilaksanakan setelah melakukan interpretasi atau penafsiran atas fakta-fakta sejarah. Tujuan historiografi ini adalah menuliskan fakta-fakta sejarah agar menjadi kisah sejarah yang dapat dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu sejarah dapat didefinisikan sebagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif dimasa lampau dan setiap pengungkapannya dapat ditambah sebagai suatu aktualisasi atau pementasan pengalaman masa lampau (Gertono Kartodirdjo, 1992 : 59).

3.2 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Mengingat dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan sumber data tertulis (dokumen) yang diperoleh dari buku perpustakaan dan juga di tempat lain, maka sifat penelitiannya dapat dikatakan studi kepustakaan (penelitian kepustakaan). Adapun pengertian penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur, baik yang ada di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain (Hadari Nawawi, 1991 : 30). Pendapat ini dipertegas oleh Kartini Kartono yang menyatakan bahwa studi kepustakaan biasanya dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang bertujuan

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam literatur yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa majalah, naskah-naskah, catatan-catatan dan lain-lain (1990 : 33). Jadi jelasnya bahwa kegiatan pengumpulan data lebih banyak dilakukan diperpustakaan, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan di tempat lain yang sekiranya menunjang dalam penelitian ini.

Metode yang penulis pakai untuk memilih dan menentukan perpustakaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian dan diperkirakan dapat memberikan informasi bagi penelitian adalah purposive sampling. Acayun pengertian dari purposive sampling adalah teknik pengambilan atau penentuan tempat penelitian yang dengan sengaja ditentukan oleh peneliti berdasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, yaitu berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Mohamad Ali, 1985 : 65). Atas dasar petunjuk ini, maka penulis menentukan tiga tempat penelitian, yaitu (1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember, (2) Perpustakaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jember, (3) Referensi Laboratorium Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember.

Alasan penulis menetapkan tempat penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas Jember adalah karena penulis mengetahui bahwa di lingkungan Universitas Jember terdapat Program Pendidikan Sejarah (di FKIP) dan terdapat juga Jurusan Sastra Sejarah (di Fakultas Sastra), dimana diperpustakaan Universitas Jember terdapat buku-buku sejarah yang dapat penulis gunakan sebagai sumber menggali data sejauh dengan masalah yang penulis bahas. Di Perpustakaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jember juga penulis gunakan sebagai tempat penelitian, karena penulis mengetahui bahwa

di perpustakaan tersebut juga mengoleksi buku-buku yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. Referensi Laboratorium Program Sejarah FKIP Universitas Jember juga mengoleksi buku-buku yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian historis, maka tahapan pertama yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan data. Mengingat penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat studi kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang penulis pakai adalah menggunakan metode dokumenter. Adapun yang dimaksud metode dokumenter menurut Suharsimi Arikunto adalah metode penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai datanya (1987 : 131). Hadari Nawawi mengatakan bahwa metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data dari peninggalan tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat-pendapat, teori-teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (1991 : 133).

Sumber bahan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber informasi dokumenter yang bersifat sekunder, yaitu yang berfungsi memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya (Kartini Kartono, 1991 : 73). Meskipun sumber yang digunakan bersifat sekunder, tetapi dalam pemakaiannya telah dieleksi sehingga nilai kebenarannya tidak kalah dengan sumber primer.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menghimpun sumber berupa buku-buku yang terdapat di perpustakaan dan

laboratorium yang telah disebutkan didepan maupun buku-buku yang telah menjadi koleksi penulis sendiri.

3.4 Metode Analisis Data

Setelah mengadakan pengumpulan data sebagai langkah yang pertama dalam penelitian sejarah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan analisis data yaitu memakai metode filosofis dengan menggunakan penalaran logis, dengan teknik induktif dan komparatif .

Eirkaitan dengan penggunaan metode sejarah sebagai alat bantu untuk merekontruksi masa lampau secara ilmiah, maka memerlukan kemampuan berfikir logis (diskursif) dan memiliki imajinasi, sehingga dalam hal ini memerlukan suatu metode yang dalam pemecahan masalahnya melalui proses berfikir rasional dalam bentuk pemikiran yang mendalam dan terarah. Oleh karena itu metode filosofis dapat dipakai sebagai metode analisis datanya. Mengingat ilmu sejarah bersifat empiris, maka sangat penting untuk berpangkal pada fakta-fakta yang tersaring dari sumber sejarah, sedangkan teori dan konsep hanya untuk mempermudah analisis (kritik) dan sintesis (interpretasi) sejarah. Menurut Sartono Kartodirdjo, apabila filsafat disini diartikan berfikir tentang pikiran kita, maka setiap metodologi adalah filsafat karena dalam menerapkan metodologi kita terus menerus mencek semua langkah dalam pekerjaan kita (1992 : 6). Adapun pengertian metode filosofis menurut hadari Nawawi adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berpikir induktif dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir (logika) (1991 : 62).

berkaitan dengan penggunaan metode filosofis dengan berdasarkan penalaran logis, maka sesuai sekali bila dipakai dalam penelitian sejarah, sebab tidaklah tepat apabila penulisan sejarah hanya semata-mata bertujuan untuk menciptakan cerita tetapi yang lebih pokok ialah membuat uraian yang memakai penalaran logis, kritis, dan berpikir logis (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 230). Adapun pengertian dari logika adalah sebagai cabang dari filsafat yang membicarakan tentang penyimpulan atau proses penalaran untuk memperoleh kebenaran (Lasiyo dan Yuwono, 1985 : 25) sedangkan W. Poespoprodjo dan T. Gilarso mengatakan bahwa logika adalah ilmu berfikir dengan tenar yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran sehingga dapat memungkinkan orang memperoleh kesimpulan yang benar (1080 : 4). Berpikir yang dimaksud dari pendapat diatas adalah kegiatan akal yang mengolah pengetahuan yang telah diterima oleh penceindera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa logika adalah ilmu yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah secara rasional, terarah dan mendalam dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang bersifat logis. Metode filosofis ini bekerja dengan menggunakan data kualitatif, sehingga dalam pemecahan masalahnya atau pembuktian hipotesisnya pada umumnya beraifat apriori (Hadari Nawawi, 1991 : 62).

Sementara itu mengenai teknik komparatif yaitu suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan suatu obyek dengan obyek lainnya yang berada dalam kondisi yang sama (Taliziduhu Ndraha, 1987 : 27). Sedangkan Mohamad Ali mengatakan bahwa teknik komparatif adalah teknik yang dipakai untuk menggantikan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena untuk mencari fakta apa saja dan situasi

bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu perilaku tertentu (1982 : 123). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik komparatif adalah suatu cara memecahkan masalah yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan kebenaran .

Adapun teknik induktif menurut Francis Bacon adalah suatu cara menarik kesimpulan umum yang diperoleh dari hasil induksi (hasil memeriksa atau mengumpulkan fakta empiris) (Sanapiah Faisal, 1992 : 7). Sedangkan Mohamad Ali mengartikan teknik induktif sebagai proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjang dari yang khusus ke yang umum (1982 : 16). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik induktif adalah cara berpikir yang berlandaskan pada pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk selanjutnya dirangkaikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian pada Bab-bab di muks, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perbedaan perdagangan antara rakyat Makasar dengan VOC yaitu perdagangan rakyat Makasar bersifat terbuka yang memberi kompetisi kepada pedagang-pedagang dari negara-negara lain untuk berdagang di Makasar dan menjual barang dagangannya kepada siapa saja yang mengajukan penawaran tertinggi. Sedangkan perdagangan yang dilakukan oleh VOC bersifat monopoli yaitu perdagangan hasil bumi yang hanya dihasilkan untuk VOC dan tidak boleh dijual atau dibeli oleh orang lain, meskipun yang menanam sendiri.
- b. Perlawanan rakyat Makasar dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC yaitu menentang dan mengadakan perlawanan baik secara diplomatik dan fisik. Ini dilakukan baik pada masa Sultan Alauddin yang telah dengan gigih melawan VOC, dilanjutkan pada masa Sultan Malikussaid. Namun pertempuran atau perlawanan yang dilakukan rakyat Makasar dalam menghadapi perdagangan VOC itu mencapai puncaknya pada masa Sultan Hasanuddin. Pada masa ini terjadi pertempuran yang hebat yaitu tahun 1654, 1660, 1666, 1669 dan tahun 1667 dan berakhir ditandatangani perjanjian Bungaya dimana rakyat Makasar telah mengakui kedudukan VOC di Makasar dan Maluku.

5.2 Saran-saran

Berdasar hasil penelitian di atas dan hasil pengalaman penulis selama proses penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran antara lain :

- a. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sejarah, sebagai calon guru sejarah, sebaiknya lebih mendalami materi sejarah sebagai persiapan terjun ke masyarakat
- b. Bagi para peneliti sebaiknya lebih banyak membaca hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian yang lebih baik,
- c. Bagi almamater. hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih banyak menyediakan literatur sehingga penelitian di Universitas Jember terus berkembang dan bermutu sebagai wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muttalib. M. 1980. Riwayat Singkat I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Mangape Sultan Hasanuddin Tumananga Ri Balaa Pangkana, Seksi Bhakti Siswa/Pemuda, Ujung Pandang.
- Amir Hamzah Nat. 1952. Sediarah Kabangsaan, Pustaka Antara Jakarta.
- Anonim. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10. Cipta Adi Pustaka Jakarta.
- _____, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Badudu J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Burger D.H., 1957. Sediarah Ekonomis Sosio-logis Ekonomi Indonesia Jilid I. Terjemahan Prajudi Atmosudidjo, Pradnya Paramitha, Djakarta.
- Fuad Hasan, 1983 Beberapa Azas metodologi Ilmiah dalam Koentjaraningrat (Red), Metode-Metoda Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hall D.G.E.. 1988. Sejarah Asia Tenggara, Usha Nasional, Surabaya.
- Hasan Sadily, dkk, 1984. Ensiklopedi Indonesia Jilis V. PN Ichtisar Baru, Jakarta.
- Ibnu Hajar, 1966. Tata Negara Republik Indonesia, Kasnenda, Surabaya.
- Kamajaya, 1982. Delapan Raja-raja Pahlawan Nasional, Up Indonesia.
- Kartini Kartono, 1985. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Alumni, Bandung.
- Kuntowijoyo, 1993. Metodologi Sejarah, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Lasiyo dan Yuwono, 1985. Pengantar Ilmu Filsafat, Liberty, Yoyakarta.

- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990, Sejarah Nasional Indonesia III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mattulada. Prof. Dr., 1991, Menyusuri Jejak Kehadiran Makasar Dalam Sejarah (1510-1700), Hasanuddi University Press, Ujung Pandang.
- Mohamed Ali, 1985, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung.
- Moh. Ali, 1983, Perdjuangan Feodal Indonesia, Ganaco, Bandung.
- Muhamad Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1971, Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah, Pusat Sejarah ABRI Dep. Pertahanan dan Keamanan, Jakarta.
- _____, 1978, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman), Yayasan Ideyu, Jakarta.
- Ricklefs, 1987, Sejarah Indonesia Modern, Gramedia, Jakarta.
- Sagimun M.D., 1983, Mengenal Pahlawan-pahlawan Nasional Kita, Bhaktara Karya Angkasa, Jakarta.
- _____, 1985, Sultan Hasanudin Menentang VOC, Dep. Perd. Dan Keb., Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1992, Format-format Penelitian Sosial, Rajawali Press, Jakarta.
- Sanusi Pane, 1952, Sejarah Indonesia Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1987, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 = 1800 dari Emporium sampai Imperium Jilid I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1992, Pendekatar Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soedinar Hardjosobroto, 1976, Sejarah Perekonomian Dunia, EPFE, Yogyakarta.
- Soekarno, 1959, Dibawah Bendera Revolusi. Jilid 1, Jakarta.

- Soekmono. 1987. Sejarah Kebudayaan Indonesia III, Kani-sius, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1992. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1988, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta.
- Sutjipto, R.M.. 1960, Sejarah Indonesia Abad XVI Sampai Sekarang Diiilid II. Indira, Djakarta.
- Sutrisno Hadi, 1991, Metodologi Research Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta.
- Taliziduha Ndraha, 1987, Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta.
- Tamara Jaya, 1951, Sejarah Perang Indonesia, Pustaka Energie Djakarta.
- Winarno Surakhmad, 1980, Pengantar Metodologi Ilmiah Dasar dan Teknik, Tarsito Bandung.
- Van Den Berg. H.J.. Kroeskomp, H.I.P. Simandjoentak, 1955, Dari Panggung Peristiwa Sejarah Dunia Jilid III, Djakarta.
- Van Leur. J.C., 1960, Indonesian Trade And Society Edisi II, Sumur Bandung Formerly, N.V. Mij Vorkink Van Hoeve, Bandung.
- Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, Profil Propinsi RI Sulawesi Selatan.
- Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1978, Sekitar Benteng Ujung Pandang, Ujung Pandang.

MATRIK PENELITIAN

TOPIK	JUDUL	PERMASALAHAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
Sejarah Perkonomian Indonesia	Perkembangan Rakyat Masyarakat dalam merger-harga pada Perdagangan VOC 1616 – 1667	1. Bagaimanalah perbedaan Perdagangan Masyarakat dan VOC? 2. Bagaimanalah perkembangan rakyat Masyarakat dalam menghadapi monopoli Perdagangan VOC.	1. Jenis Penelitian : Historik. 2. Sifat Penelitian : Studi Kepusinan	1. Buku Pustak : 5 Buah 2. Buku Penutupan : 30 Buah	1. Penentuan tempat penelitian: Purpose Sampling. 2. Pengumpulan data : Dokumenter. 3. Analisis data : Filosofik - Logika Induktif, - Logika Komparatif.	1. Sistem Perdagangan Rakyat Masyarakat berbasis terbatas sedangkan sistem perdagangan VOC berbasis Monopoli 2. Perkembangan rakyat Masyarakat dalam menghadapi monopoli perdagangan VOC yaitu meningkat dan mengadakan pertemuan secara diplomatik dan finik

Lampiran A

ISI PERJANJIAN BUNGAYA 18 NOPEMBER 1667

Pasal 1

Menyetujui perjanjian tanggal 18 Agustus 1660 yang diadakan di Batavia antara Karaeng Popo sebagai wakil berkuasa penuh Kerajaan Gowa dan Gubernur Jendral Joan Maetsuycker dan Perjanjian yang disetujui pada tanggal 2 Desember 1660 oleh Kerajaan Gowa dan Jacob Cau sebagai Komisaris Belanda.

Pasal 2

Semua pegawai bangsa Eropa dan kawula Kompeni (VOC) yang ada di Sambaopu (Makassar) dan sekitarnya, baik yang baru saja menyeberang atau lari ke pihak Gowa maupun yang sudah lama berada di Gowa tanpa ada kecuali harus segera diberikan kepada Belanda.

Pasal 3

Semua alat-alat, meriam-meriam, uang konten dan barang-barang lainnya yang telah diambil atau disita oleh pemerintah Kerajaan Gowa yang berasal dari kapal "de Walvia" yang mendapat kecelakaan atau kandas dipulau Salayar dan dari "de Lewin" yang kandas di pulau Doang-doangan (Dong Doange) harus diberikan kepada Kompeni Belanda.

Pasal 4

Orang-orang yang bersalah karena di sana-sini telah melakukan pembunuhan-pembunuhan atas diri orang-orang Belanda dan mereka yang telah merusak kapal-kapal Belanda akan dihukum di hadapan Residen Belanda.

Pasal 5

Orang-orang yang mempunyai hutang kepada Kompeni Belanda (VOC) harus membayar lunas segala hutangnya dalam waktu yang tidak begitu lama.

Pasal 6

Orang-orang Portugis dan orang-orang Inggris harus meninggalkan Gowa sebelum akhir tahun. Raja Gowa tidak boleh mengizinkan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya berdagang di dalam wilayah Kerajaan Gowa, pun tidak boleh menerima duta atau perutusan, dan surat-surat apapun dari mereka.

Pasal 7

Semua orang Eropa, kecuali Kompeni Belanda, dilarang berdagang di daerah kekuasaan Kerajaan Gowa. Hanya Kompeni Belanda saja yang boleh memasukkan atau menjual barang-barang dan bahan-bahan pakaian impor seperti dari Persia dan India serta barang-barang dari negeri Cina. Orang-orang yang melanggar ketentuan ini akan dihukum dan barang-barangnya akan disita oleh Kompeni (VOC). Dalam larangan ini tidak termasuk bahan-bahan pakaian kasar yang ditenun di daerah-daerah pesisir timur pulau Jawa.

Pasal 8

Kompeni Belanda (VOC) dibebaskan dari segala bea biaya pemasukkan atau pengeluaran barang-barang yang diangkutnya.

Pasal 9

Orang-orang Makasar hanya boleh berlayar ke daerah-daerah seperti Bali, Jawa, Batavia, Banten, Jambi, Palembang, Johor dan Kalimantan dengan memohon surat pas atau surat

izin berlayar dari Kompeni (VOC). Orang-orang yang didapati di daerah-daerah ini tanpa pasa atau disita barang-barangnya. Selanjutnya orang-orang Makassar dilarang mengirimkan perahu-perahuannya ke Bima, Solor, timor dan lain-lainnya, ke sebelah timur selat Selayar, ke sebelah utara dan timur Pulau Kalimantan, ke Mindanao (Pilipina) atau ke pulau-pulau di sekitarnya. Siapa yang melanggar hal ini dan didapati di daerah-daerah ini dapat ditangkap dan disita barang-barangnya.

Pasal 10

Semua benteng di tepi pantai yang diperkuat untuk melawan Kompeni (VOC) seperti Benteng Barombong, Benteng Pannakukang, Benteng Garassi, Benteng Mariso dan lain-lainnya harus dimusnahkan. Juga tidak boleh lagi membirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan yang baru di manapun juga. Hanya Benteng Somhaopu yang besar itu boleh tetap berdiri untuk raja Gowa.

Pasal 11

Benteng Ujung Pandang yang terletak di sebelah utara harus dikosongkan oleh pasukan-pasukan Kerajaan Gowa untuk kemudian diserahkan di dalam keadaan yang baik kepada Kompeni Belanda (VOC) yang akan menempati pasukan-pasukannya di dalam benteng itu. Perkampungan dan tanah di sekitar Benteng Ujung Pandang diserahkan pula kepada Kompeni Belanda. Loji Kompeni Belanda yang didirikan oleh Ver spreest dahulu dibangun kembali di tempat ini.

Pasal 12

Mata uang Kompeni Belanda (VOC) berlaku dan boleh beredar Ujung Pandang (Makassar).

Pasal 13

Raja dan para pembesar Gowa harus menyerahkan kepada Kompeni (VOC) seribu orang laki-laki dan perempuan yang terdiri dari orang-orang dewasa yang mudah dan sehat. Hal ini boleh dibayar dengan budak atau dengan perisai, dengan emas, dengan perak atau dengan uang sejumlah harga budak-budak itu. Separuhnya sudah harus diberikan pada bulan Juni 1668 sedang sisanya paling lambat tahun berikutnya sudah harus dilunasi.

Pasal 14

Raja dan para pembesar Gowa tidak boleh mencampuri urusan negeri Bima. Mereka tidak boleh lagi secara langeung atau tidak langsung membantu Bima baik dalam bentuk nasehat maupun tindakan untuk melawan Kompeni (VOC).

Pasal 15

Kerajaan Gowa berjanji akan menyerahkan kepada Kompeni (VOC) raja Bima menantu beliau raja Dompu, raja Tambora, raja Sanggar beserta pengikut-pengikutnya semua ada dua puluh lima orang yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Bima yang telah mengadakan pembunuhan atas orang-orang Belanda (VOC) untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian pula Kerajaan Gowa harus menyerahkan Karaeng Bontomarannu kepada Kompeni (VOC).

Pasal 16

Raja Gowa harus melepaskan haknya atas Kerajaan Buton dan mengembalikan semua orang Buton yang masih hidup yang telah ditangkap dan dibawa pergi oleh orang-orang Makassar kepada Sultan Buton.

Pasal 17

Raja Gowa harus mengembalikan pula semua orang tawanan dan semua alat-alat yang dirampas di kepulauan Sula kepada Sultan Ternate. Raja Gowa harus melepaskan segala haknya atas kepulauan Sula yang termasuk kekuasaan Sultan Ternate, demikian pula atas pulau Salayar, pulau Muna (Pansian), seluruh daerah pantai timur Sulawesi terhitung mulai Manado sampai ke pulau Muna, pulau-pulau Banggai, Gapi dan lain-lainnya. Demikian pula daerah antara Mandar dan Menado, negeri-negeri lambagi, Kaidipa, Buol, Tolitoli, Dampelae, Balaisang, Silensak, dan Kaili yang dahulu menjadi milik Kerajaan Ternate.

Pasal 18

Kerajaan Gowa harus melepaskan kekuasaannya atas Kerajaan-kerajaan Bugis (seperti Bone dan lain-lainnya) serta berjanji akan membebaskan Datu Soppeng La Teuribali beserta keluarga baginda dan mengembalikan semua tanah dan harta pasukan baginda serta raja-raja atau bangeawan Bugis yang lainnya yang ditawan dan diasingkan oleh Kerajaan Gowa. Demikian pula Kerajaan Gowa harus melepaskan semua orang-orang Bugis anak-anak dan orang-orang perempuan yang ditawannya.

Pasal 19

Kerajaan Gowa melanjutnya menyatakan akan mengakui raja Laiya dan raja Bangkala beserta seluruh negeri Turatea dan Bajeng serta daerah-daerah kekuasaannya yang sementara dalam peperangan telah datang ke pihak Kompeni (VOC) sebagai raja-raja dan daerah-daerah yang bebas (lepas dari kekuasaan Kerajaan Gowa).

Pasal 20

Semua negeri yang didalam peperangan dapat dikalahkan dan direbut oleh Kompeni (VOC) dan sekutu-sekutunya, terhitung mulai daerah Bulu-bulu sampai ke daerah Turatea dan kemudian selanjutnya dari daerah itu sampai ke Bungaya akan menjadi dan tetap sebagai negeri-negeri milik yang telah oleh Kompeni(VOC) dan sekutu-sekutunya menurut hukum perang. Kemudian setelah raja Pnna dan raja Bakka datang, maka negeri-negeri itu akan diperlakukan sesuai dengan hak Kompeni (VOC) atas daerah-daerah di sebelah utara Ujung Pandang (Makassar).

Pasal 21

Pemerintahan Kerajaan Gowa harus melepaskan haknya atas negeri-negeri Wajo, Bulobulo dan Mandar yang dianggap bersalah karena turut melawan Kompeni (VOC) dan sekutu-sekutunya. Negeri-negeri itu akan diperlakukan menurut kehendak Kompeni (VOC) dan sekutu-sekutunya.

Pasal 22

Juga disetujui bahwa orang-orang Bugis dan orang-orang Turetea yang mempunyai isteri-isteri orang Makassar dan sebaliknya orang-orang Makassar yang mempunyai isteri orang Bugis atau orang Turetea, dapat mengambil kekayaan masing-masing menurut kesukaannya. Selanjutnya orang-orang Makassar yang hendak pergi ke tempat orang-orang Bugis dan Turetea, demikian pula orang-orang Bugis dan orang-orang Turetea yang hendak pergi ke tempat orang-orang Makassar tidak akan ditahan atau dilarang jika mereka memperoleh izin dan surat keterangan dari rajanya. Tanpa izin dan surat keterangan itu mereka harus ditolak dan disuruh pulang ke tempat asalnya.

Pasal 23

Sesuai dengan bunyi pasal enam perjanjian ini, maka pemerintahan Kerajaan Gowa berjanji akan menutup negerinya bagi bangsa-bangsa lain. Apabila pemerintah Kerajaan Gowa tidak mampu menolak mereka untuk tinggal di daerah Gowa, maka pemerintah Kerajaan Gowa akan minta bantuan kepada Kompeni (VOC) yang diskuinya sebagai pelindung Gowa, dengan kewajiban selanjutnya, bahwa Gowa akan membantu Kompeni (VOC) terhadap musuh-musuh Kompeni (VOC). Gowa tidak akan mengadakan hubungan dan mengadakan perundingan-perundingan perdamaian dan sebagainya dengan bangsa atau negeri yang berperang dengan Kompeni (VOC).

Pasal 24

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas, maka ditegakkan dan dibuatlah oleh raja dan para pembesar Kerajaan Gowa sebuah perjanjian perdamaian, persahabatan dan perserikutan sepanjang masa (altoos durende vreede, vriend en Bondgenootschap), di dalam mana termasuk pula raja-raja dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton, raja-raja Bugis, Bone, Soppeng, Luwu, Turetea, Laiya, Bajeng dengan semua daerah-daerah taklukannya, demikian pula Sime serta kepala-kepala atau raja-raja yang kemudian akan memohon masuk dalam perserikutan ini.

Pasal 25

Apabila di antara negeri-negeri atau raja-raja di dalam perserikutan ini terjadi salah faham atau perselisihan, maka mereka tidak boleh terus berperang akan tetapi harus memberi tahuhan atau melaporkan persoalannya kepada pimpinan VOC yang akan menengahi dan menyelesaikan pertikaian mereka. Apabila salah satu pihak tidak mau menindahkan

perantaraan yang diberikan itu dan tetap bersitegang leher atau membangkang, maka jika semua anggota persekutuan akan memberikan bantuan kepada pihak yang lain.

Pasal 26

Dua orang terkemuka dari Hadat atau Dewan Pemerintah Kerajaan Gowa, entah Karseng Tello, Karseng Lengkese, Karaeng Popo, Karaeng Garasei atau Karaeng Karunjung, tegasnya dua orang terkemuka, akan berangkat bersama Lakeesamaan Speelman ke Batavia untuk mempersembahkan dan memohon pengesahan atas perjanjian perdamaian ini dari Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia (Heeren Raaden Van Indie). Jika dianggap perlu Gubernur Jendral dapat meminta dua orang anak Raja sebagai sandera di Batavia yang setelah setahun dapat diganti oleh orang lain.

Pasal 27

Untuk melaksanakan yang tersebut dalam pasal enam perjanjian ini Kompeni (VOC) akan mengangkut orang-orang Inggris beserta segenap barang-barangnya ke Batavia.

Pasal 28

Demikian pula untuk melaksanakan apa yang tersebut pada pasal lima kelas perjanjian ini, maka apabila di dalam jangka waktu sepuluh hari raja Bima dan Karseng Bontomarrenru tidak diketemukan dan tidak diserahkan kepada Kompeni (VOC) hidup atau mati, maka putera raja Bima dan putera Karseng Bontomarrenru akan dijadikan sandera oleh Kompeni (VOC).

Pasal 29

Pemerintahan Kerajaan Gowa, berjanji akan membayar kepada Kompeni (VOC) uang ganti biaya perang sejumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ringsit yang akan dibayar lunas dalam lima tahun berturut-turut. Hutang itu dapat dibayar dengan meriam, bahan atau hasil perdagangan, emas, perak, atau perhiasan yang senilai dengan jumlah hutang disebut.

Pasal 30 .

Perjanjian ini ditanda-tangani dan dicap oleh raja dan pembesar-pembesar Kerajaan Gowa, oleh Laksanana Speelman atas nama Kompeni (VOC) beserta semua raja-raja dan Pangeran atau pembesar yang turut dalam persekutuan ini di atas sumpah menurut adat atau cara masing-masing, pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 1667 di Bungaya.

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

UPT PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

Nomor : A19.../PT 32 H.16/Q.12.37.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : JUNIARTI
 N I M : 9202105106
 Mahasiswa : Program Pend. Sejarah
 FKIP UNIVERSITAS JEMBER
 Angkatan : 1992

Terhitung mulai bulan Maret 1996 sampai Mei 1997 telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan Jadwal sebagai berikut :

Tanggal	R. Sirkulasi	R. Referensi	Ruang OR.	R. Skripsi
17 Macet '96	X	-	-	-
22 April '96	-	X	-	-
29 April '96	-	-	X	-
5 Juli '96	X	-	-	-
21 Juli '96	-	-	X	-
12 Agust '96	-	X	-	-
27 Agust '96	-	-	-	X
7 Sept. '96	X	-	-	-
12 Sept. '96	-	X	-	-
27 Sept. '96	X	-	-	-
8 Maret '97	-	-	-	X
24 Maret '97	-	X	-	-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N a m a : JUNIARTI
 NIM / Jurusan /Program : 9202105106/Pend, IPS/Pend, SEJARAH
 J u d u l Skripsi :
 Pembimbing I : Drs. SRI HANDAYANI
 Pembimbing II : Drs. SUGIYANTO

Kegiatan Konsultasi :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Tanda tangan Pembimbing
1.	Senin, 21 Juli 1997	Bab IV dan V	<i>Sh</i>
2.	Rabu, 23 Juli 1997	Dab IV dan V	<i>Sh</i>
3.	JUM'AT, 1 Agustus '97	Bab IV, V dan Ringkasan	<i>Sh</i>
4.	<i>Sh</i>
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsul-tasi.
 2. Lembar ini harus dibawa seawaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN SKRIPSI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENERUSUNAH SKRIPSI

Nama : JUNIARTI
 NIM / Jurusan / Angkatan : 92021C5106/IPS/SEJARAH/1992
 Judul Skripsi : PERIAWANAN RAKYAT MAKASSAR DALAM
 MENGHADAPI PERDAGANGAN XEC. 1616-1667
 Pembimbing I : Drs. SRI HANAYANTI
 Pembimbing II : Drs. SUGIYANTO
 KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Pt. Pembimbing :
1.	SELASA, 20-5-'96	Judul	
2.	SELASA, 20-5-'96	Metrik	
3.	KAMIS, 8-6-'96	Metrik	
4.	SENIN, 29-6-'96	Bab I	
5.	SENIN, 4-7-'96	Bab I	
6.	SELAJA, 19-9-'96	Bab II dan III	
7.	SENIN, 9-10-'96	Bab II dan III	
8.	SENIN, 7-11-'97	Bab IV	
9.	SELAJA, 28-4-'97	Bab IV	
10.	JUM'AT, 18-6-'97	Bab IV dan V	
11.	SELAJA, 3-7-'97	Bab IV dan V	
12.
13.
14.
15.

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN
 SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Juniarti
2. Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo / 22 Juni 1972
3. Agama : Islam
4. Nama Ayah : Padmo Pawiro
5. Nama Ibu : Sri Sumarni
6. Alamat a. Asal : Jl. Raya Nguter No. 480 Sukoharjo
b. Jember : Jl. Kalimantan Gg. Kelinci 34

B. RIWAYAT PENDIDIKAN (Sekolah, Luar Sekolah)

No.	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1.	SDN 1	Nguter	1986
2.	SMP Negeri 2	Sukoharjo	1989
3.	SMA Muhammadiyah	Sukoharjo	1992
4.	Kursus Komputer Asuhan CCS	Jember	1997

C. KEGIATAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1.	Pramuka	Sukoharjo	1988
2.	Pengurus Kelamas	Jember	1995/1996